## **BANSOS**

## **Masih Menggantung**

PONTIANAK—Dugaan korupsi dana bantuan sosial komite olahraga nasional Indonesia Kalimantan Barat 2006-2009 senilai Rp22,14 miliar tetap menggantung penanganannya hingga tutup tahun 2011. Kepolisian Daerah Kalbar menyatakan kendala pengusutan karena masih menunggu audit BPK dan izin Presiden.

• ke halaman 15 kolom 2

## Masih Menggantung

Sambungan dari halaman 9

"Kita belum menerima hasil audit BPK. Hingga kini juga masih menunggu turun izin Presiden," kata Direskrim Khusus Polda Kalbar Komisaris Besar Whirdan Danny, Jumat (30/12) disela acara evaluasi Kambtibmas akhir tahun Polda Kalbar.

Kasus Bansos KONI Kalbar sendiri mulai ditangani kepolisian sejak November 2009 silam. Poltabes (sekarang Polresta) Pontianak resmi melakukan penyelidikan sejak 20 November 2009. Bahkan sejumlah saksi yang diduga mengetahui penggunaan uang tersebut, termasuk Sy, yang kala itu masih menjabat sebagai Sekda Kalbar telah diperiksa.

Kemudian Polda Kalbar mengambil alih penanganan kasus tersebut sejak tanggal Januari 2010. Namun sejak pengambilalihan itu, penanganannya sempat tersendat hampir satu tahun hingga Januari 2011. Polda beralasan tidak mengantongi audit, karena hasil audit tersebut sudah diserahkan BPK ke KPK. Dan, KPK sempat mengusut kasus tersebut.

Namun, berdasarkan surat KPK nomor R-2192/01-20 /14/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani salah satu ketuanya, Moch Jasin, KPK kembali menyerahkan penanganan Bansos KONI ke Polda Kalbar.

Direskrim menambahkan, penanganan kasus korupsi berbeda dengan tindak pidana biasa. Membutuhkan penyelidikan secara mendalam dan bukti kuat. Sementara dalam kasus Bansos KONI, Polda telah menetapkan seorang tersangka. Yakni Mantan wakil bendahara KONI, Iswanto.

Menurut Direskrim Sus, penyelidikan kasus Bansos tetap bakal diupayakan penuntasannya. Yakni terus mendalami keterangan saksi dan berkoordinasi dengan BPK. Dan, menyatakan sepanjang 2011, sebanyak 10 kasus korupsi telah kepolisian selesaikan.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Unggung Cahyono, mengatakan, komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi. Karena itu dibutuhkan dukungan segenap elemen masyarakat. Apalagi kini setiap Polda dan Polres ditarget Mabes Polri mampu mengusut kasus dugaan korupsi.

Sebagaimana UU Nomor 23/2003 mengenai Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPRD, dan DPD sudah mengatur khusus dugaan keterlibatan tindak pidana korupsi dan terorisme. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian berhak memeriksa tanpa izin Presiden.

Seperti diketahui, mencuatnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit regular yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO). Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar. (stm)